

# **TINJAUAN HUKUM TERHADAP ANAK HASIL *MA'RENDEN TEDONG* DI KABUPATEN MAMASA PROVINSI SULAWESI BARAT**

**BERNIKE KASLINA**

***Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin***

***(B111 07 064)***

---

## **ABSTRAK**

**Bernike Kaslina (B11107064) *Tinjauan Hukum Terhadap Anak Hasil Ma'renden Tedong di Kabupaten Mamasa Provinsi Sulawesi Barat*. Penulisan skripsi ini dibimbing oleh ibu A.Suryaman Mustari Pide sebagai pembimbing I dan ibu Sri Susyanti Nur sebagai pembimbing II**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem pelaksanaan Ma'renden Tedong yang dilaksanakan di Kabupaten Mamasa Provinsi Sulawesi Barat dan untuk mengetahui status dan perlindungan hukum bagi anak hasil Ma'renden Tedong sebagai ahli waris menurut hukum adat dan hukum positif.

Penelitian ini dilakukan di kecamatan Bamban Kabupaten Mamasa. Metode penelitian yang digunakan dalam pengumpulan data yaitu melalui penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan. Data primer diperoleh dengan hasil wawancara dengan pihak-pihak yang terkait yaitu ketua adat, tokoh masyarakat, dan masyarakat yang mewakili ibu, anak, dan ayah (*Ma'renden Tedong*). Sedangkan data sekunder diperoleh dari literatur-literatur dan buku-buku yang berhubungan dengan permasalahan yang penulis teliti. Data yang diperoleh baik primer maupun sekunder dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) sistem pelaksanaan *Ma'renden Tedong* yang dilaksanakan di Kabupaten Mamasa Provinsi Sulawesi Barat yaitu dengan membagi anggotanya (dewan adat) menjadi dua kelompok oleh ketua pemangku adat. Masing-masing kelompok akan mendampingi pihak laki-laki dan pihak perempuan untuk selanjutnya diarahkan untuk masuk dalam pertemuan adat guna membicarakan permasalahan yang ada dan pemberian kerbau oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Jika kedua belah pihak telah setuju dengan hasil pembicaraan, maka

kasus ini dianggap selesai dan pihak laki-laki harus meninggalkan seekor kerbau. (2) Berdasarkan hukum adat, pemberian kerbau dalam adat *Ma'renden Tedong* telah menjadi sebuah bentuk perlindungan terhadap si anak dan ibunya walaupun ketika ayah dari anak tersebut meninggal, maka anak ini tidak lagi dapat mewaris. Hukum adat tetap mengakui status anak itu sebagai anak sah dari pernikahan ayah dan ibunya. Sedangkan menurut hukum positif, dengan statusnya sebagai anak sah yang lahir dari pernikahan yang sah maka anak ini seharusnya memiliki dan dapat menuntut haknya untuk mewaris suatu saat ketika ayahnya meninggal dunia. Hukum positif memberikan perlindungan terhadap hak mewaris anak ini.

## ABSTRACT

Bernice Kaslina (B11107064) Overview Law Against Children Ma'renden results Tedong Mamasa district of West Sulawesi province. Thesis writing is guided by Mrs. A.Suryaman Mustari I Pide as mentors first and Mrs. Sri Susyanti Nur as mentors second.

This study aims to determine the implementation of the system being implemented in Ma'renden Tedong Mamasa regency, West Sulawesi province and to know the status and legal protection for the child of Ma'renden Tedong as heirs under customary law and positive law.

The research was conducted in the district of Bamban Mamasa district. The research method used in data collection is through field research and library research. Primary data were obtained by interviews with relevant parties, namely traditional leaders, community leaders, and the people who represent the mother, child, and father (Ma'renden Tedong}. While the secondary data obtained from the literature and books dealing with issues that I researched. The data obtained by both primary and secondary analyzed qualitatively.

The results showed that (1) system implementation Tedong Ma'renden conducted in South Sulawesi province Mamasa district to divide members (council) into two groups by the head of adat. Each group will assist the men and women to further directed the

parties to enter into customary meeting to discuss the problems and the provision of a buffalo by the male to the female. If both parties have to agree with the results of the talks, the case is considered completed and the men had to leave a buffalo. (2) Under common law, the customs administration Ma'renden Tedong buffalo has become a form of protection for the child and his mother even when the father of the child dies, the child is no longer heir. Customary law still recognizes the status of the child as the legitimate child of the marriage her father and mother. Meanwhile, according to positive law, its status as a legitimate child born to a valid marriage, the child should have the right to sue and be heir of a time when his father died. Positive law provides protection for the right heir children.

## **A. PENDAHULUAN**

Dewasa ini pemerintah telah berusaha meningkatkan pembangunan dibidang hukum. Indonesia adalah Negara yang berdasarkan hukum. Segala kegiatan yang dilaksanakan harus diselesaikan melalui jalur hukum. Hukum merupakan ketentuan-ketentuan yang timbul dari pergaulan hidup manusia. Hal itu timbul berdasarkan rasa kesadaran manusia itu sendiri, sebagai gejala-gejala sosial. Gejala-gejala sosial itu merupakan hasil dari pengukuran baik tentang tingkah laku manusia dalam pergaulan hidupnya.<sup>1</sup>

Pada masyarakat-masyarakat dengan kebudayaan dan struktur sosial yang sederhana, maka hukum timbul sejalan dengan pengalaman warga masyarakat di dalam proses interaksi sosial. Hukum juga mengenal adanya hukum tertulis dan hukum tidak tertulis yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat dan tetap terpelihara sebagai suatu kaidah hukum.

Kesadaran hukum dengan hukum yang benar-benar berlaku jarang terjadi konflik, oleh karena adanya proses pengendalian sosial yang langsung dari masyarakat. Pemimpin-pemimpin masyarakat sederhana biasanya mengesahkan hukum yang memang sudah ada akar-akarnya dalam kesadaran hukum para warga masyarakat. Hukum lebih banyak berfungsi sebagai sarana sistem pengendalian sosial.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2007. Halaman 2

<sup>2</sup> Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo. 2007. halaman 321

Sebagai suatu Negara yang berdasarkan hukum, Indonesia tentunya memiliki sistem-sistem hukum yang mengatur setiap masyarakat yang tinggal didalamnya. Hukum ada tentunya untuk melindungi kepentingan-kepentingan dan hak-hak setiap orang, khususnya pada bangsa Indonesia yang merupakan bangsa yang majemuk yang terdiri dari beragam suku, budaya, keyakinan, dan kebiasaan yang hidup dalam masyarakatnya, sehingga kepentingan yang ada pun sangat beragam

Tidak dapat dipungkiri di zaman yang modern seperti sekarang ini, kehidupan bangsa Indonesia semakin mengalami perkembangan dalam berbagai aspek namun, perkembangan ini tidak menggeser aturan yang lahir dari kebiasaan mereka atau hukum adatnya. Pada kenyataannya hingga saat ini khususnya di daerah pedesaan, masyarakat masih sangat memegang teguh adat istiadatnya.

Tiap masyarakat, tiap rakyat mempunyai kebudayaan sendiri dengan corak dan sifatnya yang tersendiri pula. Tiap masyarakat adat mempunyai cara berfikir tersendiri, maka hukum di dalam suatu masyarakat adat sebagai salah satu perwujudan dari cara berfikir masyarakat yang bersangkutan, mempunyai corak dan sifat yang tersendiri pula dengan perkataan lain hukum masing-masing masyarakat adalah berlain-lainan.

Hukum adat lahir dari kebiasaan-kebiasaan yang mendarah daging dalam suatu masyarakat, maka tiap-tiap daerah bahkan tiap kelompok masyarakat memiliki hukum adatnya sendiri yang berbeda dengan daerah ataupun kelompok masyarakat yang lain. Khususnya dalam tugas akhir ini penulis akan membahas mengenai kewarisan.

Berbicara mengenai kewarisan, tidak terlepas dari status anak tersebut dalam sebuah keluarga. Berdasarkan Pasal 42 UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan bahwa “anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dan atau sebagai akibat perkawinan yang sah”, dimana anak yang berstatus anak sah ini seharusnya memiliki hak mewaris dari orang tuanya. Namun, dalam adat Mamasa dikenal adat *Ma’renden Tedong* dimana seorang anak ketika masih didalam kandungan dan sang ayah meninggalkan istrinya atau ibu dari anak

tersebut, sang ayah hanya memberikan seekor Kerbau sebagai ganti rugi karena telah meninggalkan istrinya yang masih mengandung anaknya. Dengan demikian, kalimat diatas bermaksud menjelaskan bahwa seorang anak hasil *Ma'renden Tedong* tidak lagi memiliki hak mewaris ketika ayahnya tersebut meninggal dunia. Hal ini bertentangan dengan aturan yang mengatakan bahwa seorang anak sah mempunyai hak mewaris dari orang tuanya (*Legitime Portie*).

Untuk itu dalam tugas akhir ini penulis akan membahas tentang “Tinjauan hukum terhadap terhadap anak hasil *Ma'renden Tedong* dan haknya didalam mewaris”.

## **B. PEMBAHASAN**

Nama Mamasa sebenarnya berasal dari “Mamase”, artinya “tanah yang penuh kasih”. Nama ini diberikan oleh nenek Dettumanan, sebab setiap datang berburuh ke lembah itu Dettumanan sangat mujur dan dengan mudah mendapatkan binatang buruan seperti anoa dan ikan di sungai tersebut. Sehingga beliau memberi nama “Lembang Mamase” artinya “lembah yang penuh kasih”.<sup>3</sup>

Kabupaten Mamasa adalah hasil pemekaran Kabupaten Polewali Mamasa (Polmas) berdasarkan UU No.11 Tahun 2002 bersamaan dengan 22 Kabupaten dan Kota lainnya di era reformasi Indonesia pada tahun 2002.

Secara geografis Kabupaten Mamasa terletak di antara 2° 40' 00" - 3° 12' 00" Lintang Selatan dan 119° 00' 49" - 119° 32' 27" Bujur Timur. Semua wilayahnya berada di atas perbukitan dan pegunungan Quarles. Tidak ada wilayah yang berbatasan langsung dengan pantai atau laut. Mamasa sebagai Ibukota Kabupaten Mamasa terletak sekitar 290 kilometer sebelah Tenggara Kota Mamuju, Ibukota Provinsi Sulawesi Barat. Wilayah Kabupaten Mamasa sendiri berbatasan dengan wilayah daerah lain sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara dengan Kabupaten Mamuju Utara

---

<sup>3</sup> Arianus Mandadung, *Keunikan Budaya Pitu Ulunna Salu Kondosapata Mamasa*, Pemerintah Kabupaten Mamasa, Mamasa: 2005, halaman 33

- b. Sebelah Barat dengan Kabupaten Mamuju dan Kabupaten Majene
- c. Sebelah Selatan dengan Kabupaten Polewali Mandar
- d. Sebelah Tenggara dengan Kabupaten Pinrang
- e. Sebelah Timur dengan Kabupaten Tana Toraja.

Luas wilayah Kabupaten Mamasa 2.759,23 km<sup>2</sup> yang terbagi atas 111

Desa dan 12 Kelurahan yang tersebar di 13 Kecamatan yaitu :

- a. Kecamatan Tabulahan
- b. Kecamatan Aralle
- c. Kecamatan Mambi
- d. Kecamatan Bamban
- e. Kecamatan Messawa
- f. Kecamatan Sumarorong
- g. Kecamatan Nosu
- h. Kecamatan Pana'
- i. Kecamatan Tabang
- j. Kecamatan Sesenapadang
- k. Kecamatan Mamasa
- l. Kecamatan Balla
- m. Kecamatan Tanduk Kalua

Penghuni wilayah Kabupaten Mamasa adalah gabungan dari berbagai suku yaitu Mandar, Toraja Barat, dan Bugis dengan jumlah penduduk kurang lebih 130.000 jiwa. Dari segi keyakinan, wilayah Kabupaten Mamasa dihuni oleh berbagai agama yaitu Kristen Protestan, Katholik, Islam, serta agama suku yang dikenal dengan istilah setempat yaitu "*aluk tomatua*". Tetapi masyarakat mamasa sebagian besar menganut agama Kristen protestan, walaupun ada pemeluk agama lain, mereka hanya pendatang yang datang mencari hidup di Mamasa seperti pedagang, pengusaha dan Pegawai Negeri Sipil yang ditempatkan di Mamasa bukan penduduk asli Mamasa.<sup>4</sup>

Kondisi iklim di Kabupaten Mamasa bervariasi, di mana Kecamatan Mamasa, Kecamatan Sesenapadang dan Kecamatan Tanduk Kalua termasuk

---

<sup>4</sup> *Ibid.*, Hlm. 2-3.

dalam Zona Agroklimat di curah hujan rata-rata 2.140mm per tahun dengan 11 bulan basah per tahun. Kecamatan Sumarorong dan Kecamatan Messawa termasuk Agroklimat A1 dengan curah hujan rata-rata 3.155mm per tahun dengan 12 bulan basah. Kecamatan Pana' dan Kecamatan Tabang termasuk Zona Agroklimat A2 dengan curah hujan rata-rata 3.487 mm per tahun dengan 11 bulan basah. Kecamatan Aralle dan Kecamatan Tabulahan berada pada Zona Agriklimat B1 dengan curah hujan rata-rata 2.585 mm per tahun dengan 12 bulan basah.

Wilayah Kabupaten Mamasa bergunung-gunung, hanya sedikit bagian yang bergelombang dan berombak. Satuan morfologi pegunungan berbentuk kerucut yang cukup menarik pemandangan alamnya, terdapat di berbagai tempat di Kabupaten Mamasa. Terdapat sejumlah gunung tinggi dengan hutan tropis yang masih menghijau seperti Gunung Mambulilling, Gunung Gandang Dewata, Gunung Parorean, Gunung Landabanua, Gunung Tandibiring, Gunung Messila, dan lain-lain.

Adapun dari segi ekonomi, sektor andalan yang menunjang roda perekonomian Kabupaten Mamasa saat ini adalah sektor pertanian. Produksi dominan tersebut adalah padi sawah dan padi ladang mencapai 640.640 ton, produksi ubi jalar dan ubi kayu sebesar 525.790 ton, produksi jagung sebesar 310.544 ton, produksi kacang tanah sebesar 1.134 ton, dan produksi sayur – sayuran sebesar 221 ton. Sayuran meliputi bawang bombai, kentang, kol, sawi, kacang-kacangan, cabe, tomat, terong, buncis, ketimun, labu siam, bawang merah, bawang putih, dan karang merah. Dengan demikian, produksi tanaman pertanian Kabupaten Mamasa mencapai 1.199.326 ton dengan luas wilayah tanam 27.130 ha, dengan rata-rata produksi per ha mencapai 368,63 ton per ha. Sektor lain yang juga turut menunjang roda perekonomian di Kabupaten Mamasa adalah Sektor Perkebunan. Komoditas perkebunan rakyat yang paling dominan adalah Kopi Arabika, Kopi Robusta, dan Kakao.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> *Ibid.*, Hlm. 4-6.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Lius Sambokaraeng selaku tokoh masyarakat yang dituakan di wilayah Kabupaten Mamasa atau disebut juga wilayah *Pitu Ulunna Salu* menyatakan bahwa masyarakat sekarang telah menganut *ada' tuo* (adat kondo tedong). Istilah adat tuo "*Kemuitaki balumbungan ada' tua tammate mapia tang kadake*" yang berarti "Setiap persoalan yang dibawa kedalam hak adat atau diselesaikan dengan hak adat akan selesai dengan baik."

Adapun implementasi dari *ada' tuo*:

*"Dibatta bitti' tau tappa bitti' tau"*

*"Dibatta bitti' tedong tappa bitti' bai"*

*"Dibatta bitti' bai tappa bitti' manuk"*

Yang artinya setiap persoalan diselesaikan dengan tingkat persoalannya. Didalam penyelesaian hukum adat Mamasa ada 2 macam cara yaitu:

1. Menyelesaikan perkara terhadap hukum adat sesuai dengan putusan hukum adat.

Pada saat terjadi *Pa'rendengan Tedong* apabila yang menjadi korban merasa sudah dipulihkan maka masyarakat adat dan korban yang bersangkutan mengembalikan keputusan kepada Ketua adat beserta jajarannya. Dan akhirnya penyelesaian hukum adat dinyatakan sah selesai karena sudah diadakan *Parendengan Tedong*.

2. *"Mutamparapai Ada' Simemanganna Lita"*

Menurut kepercayaan orang-orang dulu, jika didalam suatu wilayah komunitas adat terjadi pelanggaran seperti misalnya ada pasangan yang berzinah atau melakukan hubungan suami istri tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah, maka masyarakat setempat mempercayai akan terjadi kutukan di wilayah tersebut seperti, banjir, hujan terus menerus, tanah longsor, dan gempa bumi. Oleh sebab itu masyarakat setempat harus memberikan korban atau tumbal untuk dipersembahkan kepada Alam berupa Babi. Sebagaimana arti kalimat diatas *"Mutamparapai Ada' Simemanganna Lita"* yang berarti



Menenangkan alam atau tanah adat. Jadi dengan dipersembahkannya seekor Babi maka kutukan itu akan hilang.<sup>6</sup>

### **1. Sistem Pelaksanaan Adat *Ma'renden Tedong* di Kabupaten Mamasa.**

Menurut Rudi Lumbongan sebagai ketua adat, menjelaskan bahwa didalam adat Mamasa dikenal adat *Ma'renden Tedong* yang artinya memberikan Kerbau. Dimana dalam pelaksanaan adat *Ma'renden Tedong* ini mempunyai tata cara prosesi dan beberapa ritual didalam melaksanakannya yaitu dimulai dengan istri yang ditinggalkan yang sudah merasa malu dan dirugikan melapor ke Ketua Pemangku adat setempat kemudian sang Ketua Pemangku adat menerima laporan tersebut tetapi tidak langsung memberikan kepastian apakah laporan tersebut diterima atau tidak karena dalam hal ini sang Ketua Pemangku adat mempunyai 2 (dua) alasan atau cara tersendiri dalam memberikan keputusan, yaitu yang pertama adalah sang Ketua Pemangku adat terlebih dahulu harus melalui perenungan, dan dibawah kedalam mimpi. Jadi sang Ketua Pemangku adat diberikan waktu 3 (tiga) hari untuk merenungkan dan membawanya ke dalam mimpi.

Tiba pada hari yang telah ditentukan, dipanggillah sang Istri yang telah melapor ke Ketua Pemangku adat dan disampaikannyalah hasil perenungan dan mimpi sang Ketua Pemangku adat. Setelah Ketua Pemangku adat Memahami semua permasalahan, maka Ketua Pemangku Adat membuat jadwal pertemuan atau masyarakat adat menyebutnya *Ma'limbo* dan kemudian memberikan undangan kepada "*Bali Ada*" atau pembantu-pembantu pemangku adat termasuk tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, kepala desa, dan tokoh politik.

Didalam pertemuan tersebut akhirnya sang Ketua Pemangku Adat beserta jajaran-jajarannya menemukan persoalan-persoalan yang memang harus diselesaikan secara hukum adat. Kemudian Ketua Pemangku Adat menunjuk 2 (dua) orang pembantu adat (*suro*) untuk menemui suaminya sekalian mengundang agar datang pada saat persidangan adat dilaksanakan. Pada saat sidang adat dilaksanakan, suami tersebut beserta keluarganya diwajibkan

---

<sup>6</sup> Lius Sambokaraeng, wawancara, 25 Januari 2013

menyiapkan makanan dan minuman guna untuk memberi makan kepada pemangku adat dan jajarannya (ini juga sudah merupakan salah satu denda atau sanksi adat).

Setelah pemangku adat dan jajarannya selesai berbicara dan berdiskusi tibalah saatnya putusan, dimana si suami dikenakan hukum adat atau sanksi adat yaitu harus *Ma'renden Tedong* kepada si istri dan keluarganya. Adapun jadwal *Ma'renden Tedong* ditentukan dua atau tiga hari setelah adanya putusan.

Para pemangku adat dibagi menjadi 2 (dua) kelompok yaitu kelompok pertama berada di rumah laki-laki (suami) yang akan *Ma'renden Tedong*, dan kelompok yang kedua berada di rumah perempuan (istri) yang akan diberikan Kerbau. Di rumah perempuan atau istri ini akan diundang seluruh masyarakat adat (*pakka*) untuk turut menyaksikan jalannya pelaksanaan adat *Ma'renden Tedong* supaya menjadi saksi sekaligus menjadi pelajaran bagi masyarakat umum.

Selanjutnya prosesi adat *Ma'renden Tedong* di rumah perempuan (istri) sebelum memulai pembicaraan semua masyarakat termasuk para pemangku adat harus *Ma'panggan* atau makan siri, setelah ritual makan siri selesai maka Tokoh adat yang berada di rumah perempuan (istri) bertanya kepada Tokoh adat yang bersama kelompok dan keluarga laki-laki (suami) yaitu tentang tujuan mereka datang *Ma'renden Tedong*.

*"Tabe' kupaloyo lamban siman kupolalan kada, tabe' lako kayu kalandona tondok, tabe' lako tomusapar tuan rondon, tomurapa lakkana lita' lamekutana kan lako to kende inde temo akara ura'na anna balajanna mu polalan kende Ma'renden Tedong?"*

Yang artinya,

"Yang terhormat para pemangku adat dan keluarga, kami ingin bertanya apa tujuan kedatangan kalian?"

Kemudian jawaban dari kelompok laki-laki

*"Ura' anna balajanna kasaeanki saekan umbawa poloan pani' repposannapan diokan orena pata' musamponkan mendalan talaki karoka,*

*musampankan madela talaki kailinni aka ki akui kumua buda ki posala makamban kipolenda kabiasaan nasurun sibawakanni rendenan Tedongki"*

Yang artinya,

"Tujuan kedatangan kami ialah kami ingin meminta maaf dan kami remuk dihadapan perempuan (istri), apapun yang menjadi keputusan adat, kami menerima berat atau ringan kami tidak akan menolak karena kami mengaku kami banyak melakukan pelanggaran adat sehingga kami datang membawa kerbau"

Kemudian kelompok dari perempuan (istri) menjawab

*"Kurre sumanga' aka ponno paperangngingi lempa manangngaki aka tanda lakona mupayao kanni pangka-pangka bulawan"*

Yang artinya,

"Terima kasih karena kami sudah mendengar kedatangan dan tujuan kalian, kami sudah dihormati dan dikembalikan jatidiri kami bahkan eksistensi hukum adat sudah dikembalikan."

*"Sitarru'na lamekutana kanni lako keluarga umba susi issi penawammu rendenan talenyana anna bulikan baimanna. "*

Yang artinya,

"Seterusnya kami akan bertanya kepada keluarga bagaimana perasaanmu mengenai kerbau yang dibawa."

Kemudian keluarga menjawab "dipasule tama riwaanna ada'." Yang artinya "kami kembalikan kepada pemangku adat, kami sudah menerima."

Putusan pemangku adat:

*"Rendengan tedong latorro dirambu langi' dirara' lembang tamparapa'i rupa tau"*

Yang artinya,

"Kerbau diambil oleh perempuan karena bercerai untuk menyelesaikan hukum adat secara supranatural."

*"Dibubung kada kurre sumanga' pole paraya diangka' langngan olo mala'bi'na puang to titanan tallu lan tangngana langi' anna melamba di apa'na litak narangngian malaika'na nene' to diponene', kumua ada'*

*tapalangnan sangke'ta susi batuan sule tama tampa rapa'na tinanda lako kondo dipulananna tamululu' banne tau muita balumbunganna ada' tuo tammate mapia tangkadake, biring la dipomarudinding randan la dipomasakke' tempatomali"*

Yang artinya,

"Akhir kata, terima kasih dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang bersemayam di atas tahta dan kepada arwah nenek moyang bahwa adat yang tidak akan punah dan tidak akan susut dapat dikembalikan kepada eksistensi hukum adat dimana orang yang melanggar hukum adat tentang perzinahan dan perceraian dapat diselesaikan dengan hukum adat yang menghasilkan perdamaian."

Dengan demikian berakhirlah Pura *mububung kada baine* atau istri yang menerima Kerbau. Kemudian para pemangku adat dan masyarakat yang hadir makan bersama, degan kata lain ritual adat *Ma'renden Tedong* ini ditutup dengan acara makan bersama.<sup>7</sup>

## **2. Status Dan Perlindungan Hukum Bagi Anak Hasil *Ma'renden Tedong* Menurut Hukum Adat Dan Hukum Positif Di Kabupaten Mamasa Provinsi Sulawesi Barat.**

Sebagai seorang yang memiliki anak, ada begitu banyak hal yang menjadi kewajiban yang harus dilaksanakan, memenuhi kebutuhan lahir dan batin misalnya memberikan nafkah, penghidupan yang layak, ketenangan batin, dan lain-lain. Namun di masa sekarang ini, banyak orang yang hanya memberikan materi yang bahkan mungkin tidak layak tanpa memperdulikan kebutuhan keluarganya yang lain.

Masyarakat di daerah mamasa mengenal peristiwa seseorang yang melakukan *Ma'renden Tedong*. Seorang anak hasil *Ma'renden Tedong* tidak lagi dapat mewaris dari ayahnya.

Adapun status anak *Ma'renden Tedong* menurut hukum adat di Mamasa yaitu anak ini tetap diakui sebagai anak sah namun ketika ayahnya telah melakukan adat *Ma'renden Tedong* terhadapnya, maka tidak ada lagi

---

<sup>7</sup> Rudi Lumbongan, wawancara, 26 januari 2013

perlindungan terhadap haknya untuk mewaris dari sang ayah ketika ayahnya tersebut meninggal dunia. Kerbau yang diberikan pada saat *Ma'renden Tedong*, telah menggantikan segala kewajiban sang ayah dan memutus hak yang seharusnya didapatkan anak ini dari orang tuanya (ayahnya).

Berdasarkan hukum adat yang berlaku di Mamasa, seorang anak hasil *Ma'renden Tedong*, kelak tidak akan menuntut ke ketua adat atau lembaga adat manapun setelah ia dewasa karena pada saat di selesaikan secara hukum adat, berarti semua masyarakat ada terutama yang bersangkutan saat itu harus tunduk pada adat, ini berarti kelak tidak akan menuntut. Tokoh adat telah memberikan penyelesaian. Semua persoalan yang telah diselesaikan mulai dari zaman dulu hingga saat ini telah diselesaikan dengan baik. Jadi lembaga adat di kabupaten Mamasa dengan tegas menyatakan dan menjamin bahwa kelak tidak akan menuntut di dalam hukum adat Mamasa.<sup>8</sup>

Dari enam responden yang meliputi dua orang ayah, dua orang ibu, dan dua orang anak, pihak ibu dan anak awalnya merasa sangat tersakiti dan malu namun seiring dengan berjalannya waktu dan penegasan atas hukum adat ini, maka responden selaku ibu dan anak mendapatkan pemulihan keadaan atas rasa malu dan pengembalian nama baik dalam masyarakat adatnya. Sedangkan responden dari pihak pria (ayah) merasa cukup melakukan tanggungjawabnya dengan pemberian kerbau tersebut (*Ma'renden Tedong*). Dengan dilakukannya adat ini, pihak pria tidak lagi berpikir ada masalah.

Berbeda halnya dengan hukum adat mamasa, hukum positif yang mengikat warga Negara Indonesia, terdapat aturan yang mengatur mengenai bagian setiap anak khususnya anak sah dalam memperoleh warisan ketika salah seorang orang tuanya meninggal dunia. Bagian-bagian ini disebut dengan *Legitime Portie*.

---

<sup>8</sup> Rudi Lumbongan, wawancara, 26 januari 2013

*Legitime portie* dimaksudkan bahwa setiap anak atau ahli waris memiliki bagian dalam warisan tersebut dan itu menjadi hak dari si ahli waris yang dapat dituntut. Tidak seperti dalam hukum adat (hukum adat Mamasa), hukum positif melindungi hak mewaris dari si anak sah. Jadi ketika orang tuanya meninggal dan meninggalkan warisan, maka si anak dapat menuntut hak mewarisnya.

## C. PENUTUP

### KESIMPULAN DAN SARAN

1. Adapun sistem pelaksanaan *Ma'renden Tedong* yang dilaksanakan di kabupaten mamasa provinsi Sulawesi selatan yaitu dengan membagi anggotanya (dewan adat) menjadi dua kelompok oleh ketua pemangku adat. Masing-masing kelompok akan mendampingi pihak laki-laki dan pihak perempuan untuk selanjutnya diarahkan untuk masuk dalam pertemuan adat guna membicarakan permasalahan yang ada dan pemberian kerbau oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Jika kedua belah pihak telah setuju dengan hasil pembicaraan, maka kasus ini dianggap selesai dan pihak laki-laki harus meninggalkan seekor kerbau.
2. Berdasarkan hukum adat, pemberian kerbau dalam adat *Ma'renden Tedong* telah menjadi sebuah bentuk perlindungan terhadap si anak dan ibunya walaupun ketika ayah dari anak tersebut meninggal, maka anak ini tidak lagi dapat mewaris. Hukum adat tetap mengakui status anak itu sebagai anak sah dari pernikahan ayah dan ibunya. Sedangkan menurut hukum positif, dengan statusnya sebagai anak sah yang lahir dari pernikahan yang sah maka anak ini seharusnya memiliki dan dapat menuntut haknya untuk mewaris suatu saat ketika ayahnya meninggal dunia. Hukum positif memberikan perlindungan terhadap hak mewaris anak ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdoel Djamali. 2007. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Abdulkadir Muhammad, 2000. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Ali Afandi. *Hukum Waris Keluarga, Hukum pembuktian*. Jakarta: Bina Aksara. 1984.
- Arianus Mandadung. *Keunikan Budaya Pitu Ulunna Salu Kondosapata Mamasa*. Mamasa: Pemerintah Kabupaten Mamasa. 2005.
- Eman Suparman. 2007. *Hukum Waris Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Hilman Hadikusuma. 2003. *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- Iman Sudiyat. 1981. *Hukum Adat-Sketsa Asas*. Yogyakarta: Liberty.
- R. Soepomo. 2007. *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*. Jakarta: PT. Pradnya Paramitha.
- Surini Ahlan Sjarif dan Nurul Elmiyah. 2005. *Hukum Kewarisan Perdata Barat*. Jakarta: Prenada Media.
- Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007
- Soerojo Wignjodipuro. 1973. *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*. Bandung: Alumni.